



RENSTRA

Rencana Strategis



**TAHUN
2021-
2026**



Jalan Robert Wolter Wonginsidi, Timbau
Kec.Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara 75511

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dapat terlaksana.

Perencanaan Strategis merupakan proses yang memperhitungkan dan mengeksplorasi berbagai faktor internal dan eksternal organisasi guna menetapkan arah pengembangan / perjalanan organisasi, tahapan serta strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini berdasarkan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 serta dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Dokumen ini berfungsi sebagai kerangka dan acuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 (Lima) Tahun kedepan.

Renstra juga dapat menjadi pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas program/kegiatan terutama di bidang Administrasi Umum Pemerintah. Rujukan bagi pemangku peran (stakeholder) untuk memberikan kontribusi dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Renstra ini juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran/aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Semoga dengan pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, diharapkan di masa mendatang Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat lebih maju mengantisipasi dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang sangat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Tenggarong, Agustus 2021

Sekretaris DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara



M. RIDHA DARMAWAN.SP.MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19701117 199803 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMABARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD	8
2.2 Susunan Organisasi	9
2.3 Sumber Daya Sekretariat DPRD	14
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.....	24
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	24
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	28
3.5 Penentuan Isu – isu Stategis	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	31
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	33
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	33

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
BAB VIII PENUTUP	61
8.1 CatatanPenting.....	61
8.2 Kaidah – kaidahpelaksanaan.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Kepegawaian Sekretariat Dprd Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021	15
Tabel 2.2	Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pada Tahun 2017 – 2020	16
Tabel 2.3	Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Sekretariat Dprd Kabupaten Kutai Kartanegara	17
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Dprd Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021	19
Tabel 3.1	Permasalahan Pokok, Permasalahan Dan Akar Masalah Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Kutai Kartanegara.....	24
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	32
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan	34
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Sekretariat Dprd Kabupaten Kutai Kartanegara	37
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama	48
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpjmd	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun kedepan dengan mempedomani Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) untuk disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur staf yang melayani Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara baik secara Administrasi maupun secara teknis. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pelaksanaan program dan kegiatan lima tahunan. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Pembangunan daerah ini mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 4421), serta

berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan sebagai unit pendukung (supporting unit) penyelenggara administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dipimpin oleh Sekretaris DPRD dengan Eselon II, terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu:

- 1) Bagian Umum;
- 2) Bagian Program & Keuangan;
- 3) Bagian Fasilitas Penganggaran & Pengawasan;
- 4) Bagian Persidangan & Perundangn – Undangn.

Masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dengan Eselon III. Sekretariat DPRD mempunyai kewajiban menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang visi misi tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD selama tahun 2016-2021 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021. Proses Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 yang telah dirubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan tim penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi–misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi,

kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan *Focus Group Discussion* antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara serta penetapan oleh Sekretaris DPRD untuk dapat dilaksanakan.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis Perubahan RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 berdasarkan kepada Pancasila sebagai Landasan Idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan sebagai landasan operasional, yaitu:

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran negara tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4286);
2. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan negara (lembaran negara tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (lembaran negara tahun 2001 nomor 90, tambahan lembaran negara nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Administrasi dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran negara nomor 4421);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman
8. Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Undang – Undang Nomo 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019- 2023;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6398);

16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan maksud memberikan arahan dan sekaligus menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas mewujudkan Visi dan Misi dalam lima tahun ke depan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara baik yang bersifat generik maupun non generik sesuai urusan dan kewenangan yang dilaksanakan.
2. Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatan.
3. Mengidentifikasi, menganalisis dan menentukan berbagai permasalahan dan isu strategis pengembangan infrastruktur lima tahun mendatang berdasarkan tugas pokok dan fungsi
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Sebagai sarana sinkronisasi kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara; serta
4. Sebagai pedoman bagi masyarakat, swasta dan *stakeholder* pembangunan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan atau pemanfaatan infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Memuat penjelasan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-, telaahan Renstra K/L, talaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Mengemukakan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjabarkan tentang strategi dan arah kebijakan dalam 5 tahun mendatang guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat

DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021- 2026

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang berbagai indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

BAB VIII PENUTUP

BAB II

Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berikut merupakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara :

2.1.1 Tugas

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2.1.2 Fungsi

- (1) Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD;
 - c. Menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi; dan
 - d. Menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD dibantu oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
- (3) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD
- (4) Kepala Sub bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada masing – masing kepala bagian.

2.2 Susunan Organisasi

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 03 Tahun 2019 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka susunan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pasal 5 terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan
- b. Bagian Umum membawakan :
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Bagian Program dan Keuangan, membawakan :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - Sub Bagian Verifikasi.
- d. Bagian Persidangan dan Perundang – Undangan, membawakan :
 - Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - Sub Bagian Kajian Perundang – Undangan; dan
 - Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawakan:
 - Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
 - Sub Fasilitasi Pengawasan; dan
 - Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat digambarkan seperti dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISSASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Adapun uraian tugas DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 03 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Dewan

- a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Sekretariat DPRD;
- b. Merumuskan kebijakan teknis Sekretariat DPRD;
- c. Merumuskan rencana program kerja Sekretariat DPRD
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Sekretariat DPRD;
- e. Merumuskan kebijakan administrasi Sekretariat DPRD;
- f. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Sekretariat DPRD;
- g. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah;

- h. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), SOP dan SPM urusan kepala Sekretariat DPRD; dan
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Bagian Umum

- a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan umum meliputi Tata Usaha dan Kepegawaian, Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- d. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- e. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- g. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- h. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- i. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- j. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- k. Menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja dan SOP urusan umum;
- m. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat DPRD;
- n. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bagian Program dan Keuangan

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Program dan keuangan meliputi perencanaan dan penganggaran, verifikasi serta akuntansi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- d. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- e. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- f. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- g. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- h. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- i. Memverifikasi pertanggung jawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- j. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- k. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- l. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- m. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja dan SOP urusan Program dan Keuangan;
- o. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Program dan Keuangan; dan
- p. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Program dan Keuangan meliputi kajian Perundang-undangan, persidangan dan Risalah serta Humas, Protokol dan Publikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- d. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan Peraturan daerah;
- e. Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Peraturan Daerah Inisiatif;

- f. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengumpulkan bahan penyiapan draf Peraturan Daerah Inisiatif;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- i. Menyusun risalah rapat;
- j. Mengoordinasikan pembahasan Peraturan Daerah;
- k. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- l. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- m. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- n. Menyelenggarakan publikasi;
- o. Menyelenggarakan keprotokolan;
- p. Mengoordinasikan penyusunan Perjanjian kinerja dan SOP urusan Persidangan dan Perundang-undangan;
- q. Mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Persidangan perundang-undangan; dan
- r. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dan KERjasama dan Aspirasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- d. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan Pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- f. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasna laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;

- g. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakkan kode etik DPRD;
- j. Memfasilitasi memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja dan SOP urusan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- o. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
- p. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.3 Sumber Daya Sekretariat DPRD

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengemban tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia berupa kepegawaian dan sumber daya anggaran serta sarana parasana yang dapat dioptimalkan pemanfaatnya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

2.3.1 Kepegawaian

Tabel 2.1
Data Kepegawaian Sekretariat DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

a) Jumlah pegawai berdasarkan jenis kepegawaian

Jenis Kepegawaian	Jumlah
ASN	179 Orang
Tenaga Harian Lepas (THL)	123 Orang
Pegawai Harian Lepas (PHL)	- Orang
Pengamanan Dalam (Pamdal)	32 Orang
Staf Ahli	25 Orang
<i>Jumlah</i>	<i>359 Orang</i>

b) Jumlah PNS berdasarkan jenis pendidikan

Pendidikan Umum	Jumlah
SD	1 Orang
SMP Sederajat	3 Orang
SMA Sederajat	96 Orang
Diploma 3 (Sarjana Muda)	5 Orang
Sarjana	59 Orang
Pasca Sarjana	15 Orang
<i>Jumlah</i>	<i>179 Orang</i>

c) Jumlah PNS berdasarkan jenis pendidikan dan pelatihan

1.	Diklatpim I	1	Orang
2.	Diklatpim III	5	Orang
3.	Diklatpim IV	9	Orang
<i>Jumlah</i>		<i>15</i>	<i>Orang</i>

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk menggerakkan roda organisasi. Oleh karena itu idealnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 359 orang.

2.3.2 Anggaran

Dari sisi anggaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2017 - 2021 beserta realisasi sebagai berikut:

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Anggaran Pada Tahun 2017 - 2020

NO	TAHUN	Jumlah Dana	Realisasi	NILAI CAPAIAN KERJA
1	2016	Rp 64.428.923.109,00	RP 60.789.862.579,00	94.35%
2	2017	Rp.61.351.036.317,00	Rp.47.760.987.079,00	77.85%
3	2018	Rp.68.678.318.529,00	Rp.61.413.875.673,00	89.42%
4	2019	Rp.67.179.563.707,00	Rp.60.550.383.667,00	90.13%
5	2020	Rp.91.227.608,953,68	Rp.82.258.292,111	90.2%

2.3.3 Aset Sarana Prasarana

Sumber daya lainnya yang tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana, yang merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun kegunaan sarana dan prasarana ini antara lain untuk: (1) Menunjang kegiatan ketatausahaan/ administrasi perkantoran; (2) Menunjang peningkatan kualitas SDM

Aparatur; serta, (3) Menunjang kegiatan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD; (4) Menunjang kegiatan.

Sekretariat DPRD menempati kantor berada di Jalan Robert Wolter Mongisidi, Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Secara umum kegunaan sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu: (1) Menunjang kegiatan ketatausahaan/administrasi perkantoran; (2) Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparatur; serta, (3) Menunjang kegiatan dalam rangka fasilitasi kegiatan DPRD; (4) Menunjang kegiatan. Adapun sarana prasarana tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Fasilitas	Jumlah	Ket
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Bidang Tanah
2	Gedung DPRD Kab. Kukar terdiri dari :		
	Gedung A (Depan)	1	2 Lantai
	Gedung B (Samping Kiri)	1	2 Lantai
	Gedung C (Samping Kanan)	1	2 Lantai
	Gedung D (Tengah)	1	2 Lantai
	Gedung E (Belakang Tengah)	1	2 Lantai
	Gedung F (Belakang Kanan)	1	1 Lantai
	Gedung G (Belakang Kiri)	1	1 Lantai
	Gedung H (Samping Kiri Tengah)	1	1 Lantai
	Gedung I (Samping Kanan Belakang)	1	1 Lantai
2	Ruangan Kerja Pimpinan :		
	Ruangan Kerja Ketua	1	Ruang Gedung A
	Ruangan Kerja Wakil Ketua	3	Ruang Gedung A
	Ruangan Kerja Anggota	45	Ruang Gedung B lantai I, Lantai II dan Gedung C Lantai I dan Lantai II
	Ruangan Kerja Komisi	4	Ruang Gedung A
	Ruangan Kerja Fraksi	8	Ruang Gedung B & C
	Ruangan Kerja BK	1	Ruang Gedung A
	Ruangan kerja Banleg.	1	Ruang Gedung A
3	Ruang Rapat :		
	Ruang Rapat	1	Ruang Gedung A
	Ruang VIP	4	Ruang Gedung A dan C

	Ruang Paripurna	1	Ruang Gedung D
	Ruang Rapat	4	Ruang Gedung A, B, C dan D
4	Ruangan Sekretariat :		
	Ruangan Kerja Sekwan	1	Ruang Gedung D
	Ruangan Kerja Kepala Bagian	4	Ruang Gedung D
	Ruangan Kerja Kepala Sub Bagian	12	Ruang Gedung D
	Ruangan Kerja Tenaga Ahli	1	Ruang Gedung A
	Ruangan Perpustakaan / Medis	1	Ruang Gedung G
	Ruangan Arsip	4	Ruang Gedung
	Pos Penjaga	4	Pos Depan dan Belakang
	Musholla	1	Ruang Gedung F
	Kantin	1	Gedung F
5	Gedung Perlengkapan :		
	- Gudang ATK	1	Ruang Gedung H
	- Gudang Inventaris	1	Ruang Gedung G
	- Rumah Genset	1	Ruang Gedung H
6	Rumah Dinas Jabatan		
	- Rumah Ketua DPRD	1	Kondisi : Baik
	- Rumah Wakil Ketua DPRD	3	Kondisi : Baik
	- Rumah Anggota DPRD	42	Kondisi : Kurang Baik

Lokasi Kantor Sekretariat DPRD yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Sekretariat DPRD dan juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam kualitas dan kuantitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, dll) dengan anggaran pemeliharaan yang juga cukup memadai, memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu unit kerja pendukung (*supporting unit*) dan unit koordinator (*coordinating unit*) dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD. Jenis Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD,

penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dapat dilihat melalui Capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode sebelumnya. Untuk mengetahui pencapaian masing-masing sasaran rencana strategis periode sebelumnya, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021

NO	PROGRAM KEGIATAN	NILAI CAPAIAN KERJA TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,73%	72,55%	88,68%	92,71%	89.3%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	89,85%	46,79%	76,49%	91,86%	96.1%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	98,44%	96,68%	99,01%	97,58%	98.0%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00%	0,00%	9,96%	85,14%	57.7%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	92,85%	68,78%	95,76%	83,24%	94.0%
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	95,87%	90,09%	92,14%	90,03%	88.3%
7	Program Pengembangan Data / Informasi	74,82%	34,93%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	97,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	98,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Adapun upaya agar tercapainya kinerja pelayanan yang optimal dipengaruhi oleh :

- a. Tercapainya Pelayanan Optimal Kepada DPRD dan Masyarakat
Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :
 - Pada prinsipnya Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tidak ada kelurahan atas pelayanan Sekretariat DPRD.
 - Produk Realisasi atau perодук keluarannya adalah Terealisasinya anggaran serta adanya Bukti-bukti yang sah yang telah dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Bahwa selama ini layanan administrasi dan Keuangan tidak pernah terjadi komplain baik dari Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara maupun aparatur pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

- b. Persidangan, Rapat-rapat, Kunjungan Kerja DPRD dan Lain-lain Berjalan lancar

Fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat (Paripurna, Banmus, Banggar, Banleg, Komisi-komisi dan Fraksi) dapat berjalan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Demikian pula kegiatan kunjungan kerja DPRD.

Pelayanan informasi baik kepada Pimpinan Anggota DPRD maupun kepada masyarakat telah dilakukan dengan baik. Hasil kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD didokumentasikan dan dipublikasikan ke masyarakat. Publikasi kegiatan DPRD pada surat kabar di Kalimantan Timur, melalui buletin yang diterbitkan secara berkala serta dalam website.

- c. Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sekretariat DPRD Meningkatkan

Tercapainya efektifitas dan efisiensi kinerja sangat ditentukan oleh pemahaman segenap sumber daya aparatur akan tugas pokok dan fungsinya serta komitmen untuk melaksnakan dengan sebaik-baiknya sebagai upaya perwujudan untuk mencapai misi dan visi organisasi yang telah ditetapkan. Pemberian pemahaman dan bimbingan serta pembinaan dalam pelaksanaan tugas telah dilakukan oleh segenap jajaran pimpinan unit kerja terhadap staff dilingkungan satuan kerja masing-masing serta didukung dengan penyusunan dan penerapan standar operating procedure (SOP) secara bertahap.

- d. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD melalui Penyediaan Fasilitas Pendukung Kinerja, Kursus, Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam menunjang pencapaian kinerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia sangatlah penting. Penugasan aparatur untuk mengikuti Diklat-diklat di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah yang sesuai

Tupoksinya. Hal tersebut merupakan implementasi kebijakan yang memberikan kesempatan yang samakepada setiap pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan mutlak dilakukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi segenap aparatur.

Penyediaan sarana dan prasarana tersebut, diiringi dengan peningkatan pemeliharaan serta optimalisasi pemanfaatannya.

e. Terbit dan Tertatanya Produk Hukum yang dihasilkan oleh DPRD

Dukungan terhadap penyusunan dan penerbitan produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD telah dilakukan seoptimal mungkin, melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Membantu menyiapkan pra Raperda
- Memobilisasi pakar untuk membantu pembahasan suatu perda atau Raperda atau Pra Raperda
- Membantu dalam memberikan masukan materi yang dibahas dalam suatu Perda atau Raperda atau Pra Raperda.
- Mempertemukan kesepahaman dan kesamaan pemikiran mengenai suatu pembahasan Perda atau Raperda atau Pra Raperda antara Anggota Dewan dengan pihak Pemerintah Daerah.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan factor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Kutai Kartanegara serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada :

1. Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.
2. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :

- a. Kekuatan (*strengths*)

Pada sisi *kekuatan* terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

- 1) Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
- 2) Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
- 3) Kemandirian dalam rangka optimalisasi fasilitasi terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 4) Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi.

- b. Kelemahan (*weaknesses*)

Pada sisi *kelemahan*, terdapat faktor-faktor yaitu : “Kurang nya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan”.

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan:

- a. Peluang (*Opportunities*)

Pada sisi *peluang*, terdapat faktor-faktor strategis antaralain:

- 1) Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 2) Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan public kedepan;

b. Tantangan/ancaman/hambatan (*Threats*)

Pada sisi tantangan/ancaman/hambatan, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
- 2) Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan;

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan public dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat.

Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berkaitan dengan kajian/analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang antara lain untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, perlu dilakukan identifikasi terhadap hambatan/kendala yang dihadapi sehingga langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan. Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi beberapa permasalahan serius yang harus segera diatasi guna dapat menyelesaikan dengan perubahan lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal, yang demikian cepat. Permasalahan-permasalahan pembangunan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Program	PERMASALAHAN POKOK (Indikator Tujuan/Sasaran)	PERMASALAHAN (Indikator Program)	AKAR MASALAH (Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan)
Generik	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Belum Optimalnya Perencanaan, Penganggaran, Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	Kecermatan dalam Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Belum Optimalnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Belum Optimalnya Fasilitas Penatausahaan Arsip (Digitalisasi)
Non Generik	Belum Optimalnya Kualitas Fasilitas kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Belum Optimalnya Kualitas fasilitas kegiatan pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	Belum Optimalnya fasilitas kegiatan Penyusunan Peraturan Perundangan, Pembahasan rancangan Peraturan Perundangan Daerah, dan

			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan serta Penyusunan Naskah Akademik
		Belum Optimalnya Kualitas fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD	Belum adanya Blue Print Bimbingan Teknis DPRD
			Belum adanya Blue Print Penyediaan Kelompok Pakar
			Belum adanya Keterlibatan Tim Pakar dalam Penyusunan Program Kerja DPRD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi Misi RPJMD

Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya tetapi lebih pada transformasi yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategis OPD, termasuk rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Visi yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang oada RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara adalah :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 tersebut, maka ditentukan Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- 1 Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani
- 2 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya
- 3 Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 4 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah
- 5 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Selain visi dan Misi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2026 yaitu Kukar Idaman.

3.2.2 Visi dan Misi RPJMD yang melekat pada Sekretariat DPRD

Visi merupakan suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Pernyataan Visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengantisipasi dengan menetapkan visi sebagai berikut :

**“Terwujudnya kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri,
Sejahtera dan Berkeadilan”**

Visi tersebut mengandung makna adanya upaya yang maksimal dari seluruh aparatur untuk bisa lebih profesional di dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan kelancaran sehingga mampu menjadi institusi yang profesional dan berkualitas, yang disepakati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekaligus yang melatar belakangi lahirnya visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik dari pada bekerja sendiri-sendiri.
2. Kearifan.

3. Berperilaku secara organisasional yaitu berintegrasi satu sama lain dalam memecahkan masalah atau krisis.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rumusan Misi SKPD adalah mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang baik membantu lebih jelas penggambaran Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya apa yang harus dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesuai dengan visi, dirumuskan misi dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan, tantangan dan perkembangan organisasi
- 2) Meningkatkan tertib administrasi kesekretariat yang akuntabel dan transparan
- 3) Meningkatkan fasilitasi serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan cara meningkatkan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayan masyarakat. Peningkatan kualitas birokrasi sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi menuju good governance.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Perencana pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian pada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikecualikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apa bila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan identifikasi permasalahan telahan terhadap RPJMD maka isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD kabupaten kutai kartanegara.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sebuah kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota Kutai Kartanegara berada di kecamatan Tenggarong, yang berbatasan dengan Kota Samarinda. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan sekitar 4.097 km² yang dibagi dalam 18 wilayah kecamatan. 18 wilayah kecamatan Tersebut terdiri dari :

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Anggana | 10. Muara Kaman |
| 2. Kembang Janggut | 11. Muara Muntai |
| 3. Kenohan | 12. Muara Wis |
| 4. Kota Bangun | 13. Samboja |
| 5. Loa Janan | 14. Sanga-Sanga |
| 6. Loa Kulu | 15. Sebulu |
| 7. Marang Kayu | 16. Tabang |
| 8. Muara Badak | 17. Tenggarong |
| 9. Muara Jawa | 18. Tenggarong Seberang |

Secara geografis Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115°26'28" BT - 117°36'43" BT dan 1°28'21" LU - 1°08'06" LS dengan batas administratif sebagai berikut:

- Utara : kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara
Timur : Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang dan Selat Makassar
Selatan : Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan
Barat : Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan dan pengendalian ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berfungsi sebagai pedoman untuk:

- Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten kutai Kartanegara dengan kawasan sekitarnya.

Setiap organisasi bagaimanapun bentuk dan apapun fungsinya tidak akan mampu untuk berdiri sendiri tanpa interaksi dengan lingkungannya. Sementara itu lingkungannya sendiri selalu mengalami perubahan. Dalam banyak hal perubahan lingkungan sering bersifat spontan dan tidak terantisipasi sebelumnya. Oleh karena itu, analisa lingkungan organisasi merupakan bagian penting dalam kajian manajemen. Kondisi umum yang dihadapi hampir semua lini pemerintahan daerah adalah terjadinya kecenderungan penurunan kualitas lingkungan hidup yang terkait erat dengan pemanfaatan tata ruang wilayah. Dalam hal ini, guna menghambat laju penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sangat dibutuhkan untuk mempermudah perencanaan dan pembangunan infrastruktur dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Hasil analisis lingkungan strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kutai kartanegara dengan disajikan dalam martiks berikut ini:

Kelemahan (Eaknesses) :

1. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Masih relative kurangnya pemahaman pejabat fungsional umum terhadap tugas pokok dan fungsinya sehingga menyebabkan kurang keserasian dalam pelaksanaan tupoksi inter dan antar sub unit kerja
3. Mekanisme kerja yang sinergis, efektif dan efisien belum sepenuhnya terwujud.
Belum optimalnya pemanfaatan IT untuk meningkatkan pelayanan terhadap Anggota dan Pimpinan DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Kekuatan (Stenghts) :

1. Tugas dan Fungsi yang jelas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019
2. Jumlah yang memadai secara kuantitas
3. Tingkat pendidikan formal pegawai yang cukup memadai

Dukungan segenap Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Guna mendukung pelaksanaan tugas Legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD.

Peluang (Opportunities) :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
2. Ketersediaan peraturan perundang – undangan ditingkat nasional yang menjamin eksistensi Sekretariat DPRD.
3. Terbukanya peluang untuk mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik SDM Sekretariat maupun Pimpinan dan Anggota DPRD. Tingginya harapan masyarakat untuk menjadikan DPRD sebagai pilar demokrasi di daerah yang menjamin penyaluran aspirasi masyarakat

Tantangan (Threats) :

1. Citra DPRD sangat tergantung pada opini masyarakat yang dipengaruhi oleh pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik.
2. Tuntutan dan harapan masyarakat kepada DPRD untuk memantapkan pelembagaan demokrasi dan pembentukan perda yang adil, tidak diskriminatif dan memihak rakyat kecil

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian misi dan visi organisasi. Tujuan (goals) adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian misi dan visi organisasi. Tujuan (goals) adalah pernyataan umum tentang “ke arah mana” suatu organisasi akan berada di masa depan, merupakan penjabaran Misi, Sesuatu (what) yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan dibatasi jumlahnya agar lebih terfokus; meskipun demikian tujuan belum bersifat spesifik dan tidak terukur.

Sasaran (Objectives) bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan (penjabaran dari tujuan secara terukur). Sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terkunci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan target yang bersifat spesifik dan terukur dari tiap tujuan biasanya disusun beberapa sasaran. Karena yang dapat diukur adalah sasaran (bukan tujuan), maka bila semua sasaran telah tercapai maka tujuan dianggap tercapai pula. Maka tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD beserta Indikator kinerja disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Capaian	Proyeksi	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
						2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Mewujudkan Kualitas Fasilitas terhadap Agenda Kegiatan DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap fasilitas kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD	Nilai	66,89 (2019)	66,89 (2019)	70	70	73	73	75	75
			Meningkatkan Dukungan Sekretariat terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD	Prosentase Fasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretariat DPRD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah (PD) Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah (PD) Sekretariat DPRD yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) Sekretariat DPRD menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah (PD) Sekretariat DPRD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah (PD) Sekretariat DPRD . Dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) Sekretariat DPRD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah (PD) Sekretariat DPRD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan Perangkat Daerah (PD) Sekretariat DPRD, Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah (PD) Sekretariat DPRD mempunyai tujuan dan sasaran dengan afektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Maka Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah (PD) Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang disajikan dalam table sebagai berikut :

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Strategy	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Kepuasan DPRD terhadap fasilitasi kegiatan DPRD	Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1. Optimalisasi Proses Perencanaan, Penganggaran, Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	1. Peningkatan Koordinasi Intensif dengan Lintas Bagian dalam Hal Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Peningkatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	✓	✓	✓	✓	✓
			3. Peningkatan Fasilitas Penatausahaan Arsip (Digitalisasi)	✓	✓	✓		
		2. Optimalisasi Kualitas fasilitasi kegiatan pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	1. Peningkatan Kualitas fasilitasi kegiatan Penyusunan Peraturan Perundangan, Pembahasan rancangan Peraturan Perundangan Daerah, dan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan serta	✓	✓	✓	✓	✓

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

			Penyusunan Naskah Akademik melalui Pelibatan Tim Pakar dan Akademisi					
		3. Optimalisasi Kualitas fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD	1. Penyediaan Blue Print Bimbingan Teknis DPRD	✓				
			2. Penyediaan Blue Print Penyediaan Kelompok Pakar	✓				
			3. Peningkatan Keterlibatan Tim Pakar dalam penyusunan Program Kerja DPRD	✓	✓	✓	✓	✓

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama lima tahun. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgencitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program. Semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan selain untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. rencana program kegiatan dan pendanaan Sekretariat DPRD dalam kinerja kelompok sasaran dan pendanaan dituang dalam tabel sebagai berikut :

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SEKRETARIT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Kualitas Fasilitas terhadap Agenda Kegiatan DPRD				Indeks Kepuasan DPRD terhadap fasilitasi kegiatan DPRD	Nilai	66,89 (2019)	70 (B)		70 (B)		73 (B)		73 (B)		75 (B)		75 (B)		SEKWAN	SET. DPRD KUKAR				
Meningkatkan Dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kedinasan DPRD				Prosentase Fasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Prosentase (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		SEKWAN	SET. DPRD KUKAR				
		4 02 0 2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP	72,53 (2020)	77 (BB)	74,587,059,139	79 (BB)	74,587,059,139	81 (A)	74,587,059,139	83 (A)	74,587,059,139	85 (A)	74,587,059,139	85 (A)	372,935,295,695	1. BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN 2. BAGIAN UMUM (Penunjang Urusan)	SET. DPRD KUKAR				
		4 02 01 2 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	1,650,000,000	12	1,650,000,000	12	1,650,000,000	12	1,650,000,000	12	1,650,000,000	60	8,250,000,000	BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN	SET. DPRD KUKAR			

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai kartanegara

	4	02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	10	1,250,000,000	SUBBAG. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	10	1,250,000,000	SUBBAG. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,000,000,000	SUBBAG. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	10	1,250,000,000	SUBBAG. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,000,000,000	SUBBAG. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	10	1,250,000,000	SUBBAG. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	10	1,250,000,000	SUBBAG. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	6	6	20,676,470,758	30	103,382,353,790	BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN	SET. DPRD KUKAR								
	4	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	12	2,136	19,419,724,758	2,136	19,419,724,758	2,136	19,419,724,758	2,136	19,419,724,758	2,136	19,419,724,758	10,680	97,098,623,790	SUBBAG. VERIFIKASI	SET. DPRD KUKAR

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

	4	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	2	2	117,240,000	2	117,240,000	2	117,240,000	2	117,240,000	2	117,240,000	10	586,200,000	SUBBAG. VERIFIKASI	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	6	12	108,953,000	12	108,953,000	12	108,953,000	12	108,953,000	12	108,953,000	60	544,765,000	SUBBAG. VERIFIKASI	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	1	45,500,000	1	45,500,000	1	45,500,000	1	45,500,000	1	45,500,000	5	227,500,000	SUBBAG. AKUNTANSI DAN PELAPORAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kali	6	2	126,425,000	2	126,425,000	2	126,425,000	2	126,425,000	2	126,425,000	10	632,125,000	SUBBAG. AKUNTANSI DAN PELAPORAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	18	858,628,000	18	858,628,000	18	858,628,000	18	858,628,000	18	858,628,000	90	4,293,140,000	SUBBAG. AKUNTANSI DAN PELAPORAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	254,250,000	5	1,271,250,000	BAGIAN UMUM	SET. DPRD KUKAR								
	4	02	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	1	1	254,250,000	1	254,250,000	1	254,250,000	1	254,250,000	1	254,250,000	5	1,271,250,000	KASUBBAG. PERLENGKAPAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	4	1,436,065,000	20	7,180,325,000	BAGIAN UMUM	SET. DPRD KUKAR								

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai kartanegara

	4	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Unit	305	311	500,000,000	311	500,000,000	311	500,000,000	311	500,000,000	1,555	2,500,000,000	KASUBBAG. TATA USAHA & KEPEGAWAIAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	108	50	336,065,000	50	336,065,000	50	336,065,000	50	336,065,000	250	1,680,325,000	KASUBBAG. TATA USAHA & KEPEGAWAIAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	17	250,000,000	17	250,000,000	17	250,000,000	17	250,000,000	85	1,250,000,000	KASUBBAG. TATA USAHA & KEPEGAWAIAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	20	350,000,000	20	350,000,000	20	350,000,000	20	350,000,000	100	1,750,000,000	KASUBBAG. TATA USAHA & KEPEGAWAIAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	2,758,211,994	6	2,758,211,994	6	2,758,211,994	6	2,758,211,994	30	13,791,059,970	BAGIAN UMUM	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	4,028	4,028	715,965,994	4,028	715,965,994	4,028	715,965,994	4,028	715,965,994	20,140	3,579,829,9720	KASUBBAG. PERLENGKAPAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Porsi	9,504	9,504	1,010,422,000	9,504	1,010,422,000	9,504	1,010,422,000	9,504	1,010,422,000	47,520	5,052,110,000	KASUBBAG. PERLENGKAPAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Lembar	3,180	3,180	415,924,000	3,180	415,924,000	3,180	415,924,000	3,180	415,924,000	15,900	2,079,620,000	KASUBBAG. PERLENGKAPAN	SET. DPRD KUKAR

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

						Pengandaan yang disediakan																	
		4	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	Eksempplar	38,352	38,352	160,900,000	38,352	160,900,000	38,352	160,900,000	38,352	160,900,000	191,760	804,500,000	KASUBBAG. PERLENGKAPAN	SET. DPRD KUKAR
		4	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Orang/Kali	218	218	318,500,000	218	318,500,000	218	318,500,000	218	318,500,000	1,090	1,592,500,000	KASUBBAG. TATA USAHA & KEPEGAWAIAN	SET. DPRD KUKAR
		4	02	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	Berkas	2	7	136,500,000	7	136,500,000	7	136,500,000	7	136,500,000	35	682,500,000	KASUBBAG. TATA USAHA & KEPEGAWAIAN	SET. DPRD KUKAR
		4	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1,389	1,389	1,500,000,000	1,389	1,500,000,000	1,389	1,500,000,000	1,389	1,500,000,000	6,945	7,500,000,000	BAGIAN UMUM	SET. DPRD KUKAR
		4	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	308	308	700,000,000	308	700,000,000	308	700,000,000	308	700,000,000	1,540	3,500,000,000	KASUBBAG. PERLENGKAPAN	SET. DPRD KUKAR
		4	02	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1,081	1,081	800,000,000	1,081	800,000,000	1,081	800,000,000	1,081	800,000,000	5,405	4,000,000,000	KASUBBAG. PERLENGKAPAN	SET. DPRD KUKAR

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai kartanegara

		4	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	8,453,870,000	12	8,453,870,000	12	8,453,870,000	12	8,453,870,000	60	42,269,350,000	BAGIAN UMUM	SET. DPRD KUKAR		
		4	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	Bulan	800	12	3,870,000	12	3,870,000	12	3,870,000	12	3,870,000	12	3,870,000	60	19,350,000	KASUBBAG. TATA USAHA & KEPEGAWAIAN	SET. DPRD KUKAR
		4	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	48	12	2,500,000,000	12	2,500,000,000	12	2,500,000,000	12	2,500,000,000	12	2,500,000,000	60	12,500,000,000	KASUBBAG. RUMAH TANGGA	SET. DPRD KUKAR
		4	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	Bulan	2340	12	5,950,000,000	12	5,950,000,000	12	5,950,000,000	12	5,950,000,000	12	5,950,000,000	60	29,750,000,000	KASUBBAG. RUMAH TANGGA	SET. DPRD KUKAR
									2.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	0	12		12		12		12		12	60				
		4	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	793	254	1,802,553,000	254	1,802,553,000	254	1,802,553,000	254	1,802,553,000	1,270	9,012,765,000	BAGIAN UMUM	SET. DPRD KUKAR		
										Kali	0	384			384		384				384		1,920		SET. DPRD KUKAR
		4	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Unit	47	47	311,048,000	47	311,048,000	47	311,048,000	47	311,048,000	47	311,048,000	235	1,555,240,000	KASUBBAG. PERLENGKAPAN	SET. DPRD KUKAR

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

				4	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	47	47	311,505,000	47	311,505,000	47	311,505,000	47	311,505,000	47	311,505,000	235	1,557,525,000	KASUBBAG. PERLENGKAPAN	SET. DPRD KUKAR	
				4	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Unit	104	10	800,000,000	10	800,000,000	10	800,000,000	10	800,000,000	10	800,000,000	50	4,000,000,000	KASUBBAG. PERLENGKAPAN	SET. DPRD KUKAR	
												Kali	0	144		144		144		144		144		720				
				4	02	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Unit	595	150	380,000,000	150	380,000,000	150	380,000,000	150	380,000,000	150	380,000,000	750	1,900,000,000	KASUBBAG. PERLENGKAPAN	SET. DPRD KUKAR	
												Kali	0	240		240		240		240		240		1,200				
				4	02	01	2	15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan	2	2	31,802,468,387	2	31,802,468,387	2	31,802,468,387	2	31,802,468,387	2	31,802,468,387	10	159,012,341,935	1. BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN 2. BAGIAN UMUM	SET. DPRD KUKAR	
				4	02	01	2	15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	12	540	31,432,018,387	540	31,402,018,387	540	31,402,018,387	540	31,402,018,387	540	31,402,018,387	2,700	157,040,091,935	SUBBAG. VERIFIKASI	SET. DPRD KUKAR	
				4	02	01	2	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Stell	520	520	370,450,000	520	320,450,000	520	320,450,000	520	320,450,000	520	320,450,000	2,600	1,652,250,000	KASUBBAG. PERLENGKAPAN	SET. DPRD KUKAR	
										Pelaksanaan Medical Check up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang		45	0	45	0	45	80,000,000	45	80,000,000	45	80,000,000	45	80,000,000	225	320,000,000		

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

		4	02	02	2	01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Raport	24	24	3,823,500,000	24	3,823,500,000	24	3,823,500,000	24	3,823,500,000	24	3,823,500,000	120	19.117.500.000	Subbag Kajian Perundang-Undangan	SET. DPRD KUKAR	
		4	02	02	2	01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	kajian	1	24	381,650,000	24	381,650,000	24	381,650,000	24	381,650,000	24	381,650,000	120	1.908.250.000	Subbag Kajian Perundang-Undangan	SET. DPRD KUKAR	
		4	02	02	2	01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dokumen	4	8	937,800,000	8	937,800,000	8	937,800,000	8	937,800,000	8	937,800,000	40	4.689.000.000	Subbag Kajian Perundang-Undangan	SET. DPRD KUKAR	
		4	02	02	2	01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	Dokumen	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	Subbag Kajian Perundang-Undangan	SET. DPRD KUKAR
		4	02	02	2	02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Rapat Pembahasan	Rapat	8	18	1,050,000,000	90	5,250,000,000	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN	SET. DPRD KUKAR									
		4	02	02	2	02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS	Rapat	2	5	375,000,000	5	375,000,000	5	375,000,000	5	375,000,000	5	375,000,000	25	1,875,000,000	SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN	SET. DPRD KUKAR	
		4	02	02	2	02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rapat	2	5	375,000,000	5	375,000,000	5	375,000,000	5	375,000,000	5	375,000,000	25	1,875,000,000	SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN	SET. DPRD KUKAR	
		4	02	02	2	02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD	Rapat	1	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	10	500,000,000	SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN	SET. DPRD KUKAR	
		4	02	02	2	02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	Rapat	1	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	10	500,000,000	SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN	SET. DPRD KUKAR	
		4	02	02	2	02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Pembahasan Laporan Semester	Rapat	1	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	20	250,000,000	SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN	SET. DPRD KUKAR	
		4	02	02	2	02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rapat	1	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	20	250,000,000	SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN	SET. DPRD KUKAR	

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai kartanegara

		4	02	02	2	03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan DPRD	Kali	254	190	4,322,500,000	190	4,322,500,000	190	4,322,500,000	190	4,322,500,000	950	21,612,500,000	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN	SET. DPRD KUKAR		
		4	02	02	2	03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan	36	36	682,500,000	36	682,500,000	36	682,500,000	36	682,500,000	180	3,412,500,000	SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN	SET. DPRD KUKAR		
		4	02	02	2	03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan	36	36	682,500,000	36	682,500,000	36	682,500,000	36	682,500,000	180	3,412,500,000	SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN	SET. DPRD KUKAR		
		4	02	02	2	03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan	36	36	682,500,000	36	682,500,000	36	682,500,000	36	682,500,000	180	3,412,500,000	SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN	SET. DPRD KUKAR		
		4	02	02	2	03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan	36	36	682,500,000	36	682,500,000	36	682,500,000	36	682,500,000	180	3,412,500,000	SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN	SET. DPRD KUKAR		
		4	02	02	2	03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan	36	36	682,500,000	36	682,500,000	36	682,500,000	36	682,500,000	180	3,412,500,000	SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN	SET. DPRD KUKAR		
		4	02	02	2	03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan	36	4	364,000,000	4	364,000,000	4	364,000,000	4	364,000,000	4	364,000,000	20	1,820,000,000	SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN	SET. DPRD KUKAR
		4	02	02	2	03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan	36	4	364,000,000	4	364,000,000	4	364,000,000	4	364,000,000	4	364,000,000	20	1,820,000,000	SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN	SET. DPRD KUKAR

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

	4	02	02	2	03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Rapat	2	2	182,000,000	2	182,000,000	2	182,000,000	2	182,000,000	2	182,000,000	10	910,000,000	SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN	SET. DPRD KUKAR		
	4	02	02	2	04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100%	100%	5,391,260,000	100%	26,956,300,000	BAGIAN PERSIDANGAN & PERUNDANGAN	SET. DPRD KUKAR										
	4	02	02	2	04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Peserta Orientasi	Orang		0		0		45		0			0	45	0	SUB BAGIAN HUMAS, PROTOKOL & PUBLIKASI	SET. DPRD KUKAR		
	4	02	02	2	04	02	Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	Orang	0	45	1,274,750,000	45	1,274,750,000	45	1,274,750,000	45	1,274,750,000	45	1,274,750,000	45	1,274,750,000	225	6,373,750,000	SUB BAGIAN HUMAS, PROTOKOL & PUBLIKASI	SET. DPRD KUKAR
	4	02	02	2	04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Media Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Media	8	15	1,974,210,000	15	1,974,210,000	15	1,974,210,000	15	1,974,210,000	15	1,974,210,000	15	1,974,210,000	75	9,871,050,000	SUB BAGIAN HUMAS, PROTOKOL & PUBLIKASI	SET. DPRD KUKAR
	4	02	02	2	04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	120	120	1,505,300,000	120	1,505,300,000	120	1,505,300,000	120	1,505,300,000	120	1,505,300,000	120	1,505,300,000	600	7,526,500,000	SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH	SET. DPRD KUKAR
	4	02	02	2	04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Orang	84	7	295,750,000	7	295,750,000	7	295,750,000	7	295,750,000	7	295,750,000	7	295,750,000	35	1,478,750,000	SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH	SET. DPRD KUKAR
	4	02	02	2	04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kegiatan	1	1	182,000,000	1	182,000,000	1	182,000,000	1	182,000,000	1	182,000,000	1	182,000,000	5	910,000,000	SUB BAGIAN HUMAS, PROTOKOL & PUBLIKASI	SET. DPRD KUKAR
	4	02	02	2	04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja DPRD	Dokumen	1	1	159,250,000	1	159,250,000	1	159,250,000	1	159,250,000	1	159,250,000	1	159,250,000	5	796,250,000	SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH	SET. DPRD KUKAR
	4	02	02	2	05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan yang terlaksana	Persen	100%	100%	3,683,660,000	100%	18,418,300,000	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN	SET. DPRD KUKAR										

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai kartanegara

	4	02	02	2	05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen	4	2	129,485,000	2	129,485,000	2	129,485,000	2	129,485,000	2	129,485,000	10	647,425,000	SUB BAGIAN KERJASAMA & ASPIRASI	SET. DPRD KUKAR
	4	02	02	2	05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	Kegiatan	3	3	3,554,175,000	3	3,554,175,000	3	3,554,175,000	3	3,554,175,000	3	3,554,175,000	15	17,770,875,000	SUB BAGIAN KERJASAMA & ASPIRASI	SET. DPRD KUKAR
	4	02	02	2	06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan	Persen	100%	100%	333,790,000	100%	1,668,950,000	BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN	SET. DPRD KUKAR								
	4	02	02	2	06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen	1	1	136,500,000	1	136,500,000	1	136,500,000	1	136,500,000	1	136,500,000	5	682,500,000	SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	02	2	06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan	36	10	197,290,000	10	197,290,000	10	197,290,000	10	197,290,000	10	197,290,000	50	986,450,000	SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN	SET. DPRD KUKAR
	4	02	02	2	08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	100%	100%	10,647,900,000	100%	53,239,500,000	BAGIAN PERSIDANGAN & PERUNDANGAN	SET. DPRD KUKAR								
	4	02	02	2	08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi/ Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi	288	96	7,694,800,000	96	7,694,800,000	96	7,694,800,000	96	7,694,800,000	96	7,694,800,000	480	38,474,000,000	SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH	SET. DPRD KUKAR
	4	02	02	2	08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rapat	10	14	182,000,000	14	182,000,000	14	182,000,000	14	182,000,000	14	182,000,000	70	910,000,000	SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH	SET. DPRD KUKAR
	4	02	02	2	08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rapat	1	96	2,771,100,000	96	2,771,100,000	96	2,771,100,000	96	2,771,100,000	96	2,771,100,000	480	13,855,500,000	SUB BAGIAN HUMAS, PROTOKOL & PUBLIKASI	SET. DPRD KUKAR
							TOTAL					105,427,869,139		687,921,722,687										

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara dalam kinerja penyelenggaraan bidang urusan sesuai dengan tujuan SKPD Meningkatkan Pelayanan publik pemerintah daerah dengan Sasaran (1). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD dan (2) Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD yang terkait Dengan Misi Pemda yaitu memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat yang terkait dengan Tujuan SKPD,

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan
2. Meningkatnya pelayanan publik Pemerintah Daerah.

Tabel. 7.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	CAPAIAN FISIK	KESIMPULAN
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Predikat Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai	80.00	65.78	Terkendalanya website dalam keadaan gangguan sehingga ada beberapa program kegiatan yang tidak bisa dipublikasikan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Audit Layanan Sekretariat DPRD	Sertifikat	1.00	1.00	kualitas pelayanan Sekretariat DPRD tercapai sesuai target

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.2 yang bersumber dari Tabel T-C.28 sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode PRJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahu 1	Tahu 2	Tahu 3	Tahu 4	Tahu 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nilai SAKIP	72,53 (2020)	79 (BB)	81 (A)	83 (A)	85 (A)	85 (A)	85 (A)
1	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	12	12	12	60	60
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	2	10	10
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	2	2	10	10
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	1	5	5
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2	2	2	2	2	10	10

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	1	5	5
	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	2	10	10
	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	2	2	2	10	10
2	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	6	6	6	6	6	30	30
	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12	2,136	2,136	2,136	2,136	10,680	10,680
	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	2	2	2	2	10	10
	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	12	12	12	12	60	60
	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	1	1	1	1	5	5
	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6	2	2	2	2	10	10

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	12	18	18	18	18	90	90
3	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	5	5
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1	1	1	1	1	5	5
4	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4	4	4	4	4	20	20
	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	305	311	311	311	311	1,555	1,555
	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108	50	50	50	50	250	250
	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	15	17	17	17	17	85	85
	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	20	20	20	20	20	100	100

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

5	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	6	6	6	6	30	30
	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4,028	4,028	4,028	4,028	4,028	20,140	20,140
	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	9,504	9,504	9,504	9,504	9,504	47,520	47,520
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	15,900	15,900
	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	38,352	38,352	38,352	38,352	38,352	191,760	191,760
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	218	218	218	218	218	1,090	1,090
	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	2	7	7	7	7	35	35
6	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	6,945	6,945

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

	Daerah							
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	308	308	308	308	308	1,540	1,540
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	5,405	5,405
7	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	12	12	12	12	60	60
	Jumlah surat menyurat	800	12	12	12	12	60	60
	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	12	12	12	12	60	60
	1.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	2340	12	12	12	12	60	60
	2.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	12	12	12	12	60	60
8	Jumlah Barang Milik Daerah	793	254	254	254	254	1,270	1,270
		0	384	384	384	384	1,920	1,920

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	47	47	47	47	47	235	235
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	47	47	47	47	47	235	235
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	104	10	10	10	10	50	50
		0	144	144	144	144	720	720
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	595	150	150	150	150	750	750
		0	240	240	240	240	1,200	1,200
9	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	2	2	2	2	2	10	10
	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Gaji dan	12	540	540	540	540	2,700	2,700

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

	Tunjangan							
	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	520	520	520	520	520	2,600	2,600
10	Jumlah layanan Administrasi DPRD	3	3	3	3	3	15	5
	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2	1	1	1	1	5	5
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	349	349	349	349	349	1,745	1,745
	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4	4	4	4	4	20	20
	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Rapat-Rapat Kerja DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Fasilitasi Pengawasan dan Pembahasan Penganggaran APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat	25	16	16	16	16	80	80
	Jumlah Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	10	10	10	10	50	50
	Jumlah Pembahasan Rancangan	24	24	24	24	24	120	120

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

	Peraturan Daerah							
	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1	24	24	24	24	120	120
	Jumlah Dokumen Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4	8	8	8	8	40	40
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	0	0	1	0	0	1	1
12	Jumlah Rapat Pembahasan	8	18	18	18	18	90	90
	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS	2	5	5	5	5	25	25
	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	5	5	5	5	25	25
	Jumlah Pembahasan APBD	1	2	2	2	2	10	10
	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	1	2	2	2	2	10	10
	Jumlah Pembahasan Laporan Semester	1	2	2	2	2	10	10
	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	2	2	2	2	10	10
13	Jumlah Pengawasan DPRD	254	190	190	190	190	950	950

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai kartanegara

Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	36	36	36	36	36	180	180
Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	36	36	36	36	36	180	180
Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36	36	36	36	36	180	180
Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36	36	36	36	36	180	180
Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	36	36	36	36	36	180	180
Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	36	4	4	4	4	20	20
Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran	36	4	4	4	4	20	20
Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala	2	2	2	2	2	10	10

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

	Daerah							
14	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%						
	Jumlah Peserta Orientasi		0	45	0	0	45	45
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	0	45	45	45	45	225	225
	Jumlah Media Publikasi dan Dokumentasi Dewan	8	15	15	15	15	75	75
	Jumlah Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	120	120	120	120	120	600	600
	Jumlah Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	84	7	7	7	7	35	35
	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	1	1	1	1	5	5
	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja DPRD	1	1	1	1	1	5	5
15	Persentase Kegiatan yang terlaksana	100%						
	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD	4	2	2	2	2	10	10

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

	Jumlah Pelaksanaan Reses	3	3	3	3	3	15	15
16	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan	100%						
	Jumlah Dokumen Penyusunan Kode Etik DPRD	1	1	1	1	1	5	5
	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD	36	10	10	10	10	50	50
17	Prosentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%						
	Jumlah Koordinasi/ Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	288	96	96	96	96	480	480
	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10	14	14	14	14	70	70
	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1	96	96	96	96	480	

Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan Tahun 2022-2026 berfungsi sebagai Tolak ukur dalam capaian target kinerja melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara karena akan menentukan keberhasilan program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disusun sesuai nomenklatur. Dengan demikian

RENSTRA 2021-2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan Visi dan Misi Daerah yang ingin dicapai.

BAB VIII PENUTUP

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini disusun Dokumen rencana strategis (Renstra) dengan memperhatikan substansi materi Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten kutai kartanegara tahun 2022-2026. Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran, dan tujuan bagi aparatur Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

8.1. Catatan Penting

Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Selanjutnya dalam penjabaran program, Kegiatan dan sub Kegiatan, dan dalam pelaksanaan bertanggung jawab pada sekretaris dewan. Setiap awal tahun, renstra akan di jabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja dan pada akhir tahun, Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi sesuai dengan penetapan kerja.

8.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kutai kartanegara dalam Rencana Setrategis tahun 2022-2026 hendaknya dapat diimplementasikan dengan tanggung jawab moral dan dedikasi yang tinggi, dengan koordimasi, kerjasama dan keterpaduan/sinergisitas serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran aparatur sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kutai kartanegara.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Sekretariat DPRD kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, Agustus 2021

Sekretaris DPRD

Kabupaten/Kota Kartanegara



M.RIDHA DARMAWAN.SP.MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19701117 199803 1 008